

BAB III METODE PENELITIAN

Sebagai pertanggung-jawaban metodologis penelitian ini, secara berurutan disajikan: (1) maksud penelitian, (2) pendekatan dan rancangan penelitian, (3) pemilihan lokasi dan kasus penelitian, (4) kehadiran peneliti dan kegiatan lapangan, (5) kelayakan data, (6) analisis data, dan (7) interpretasi hasil dan rekonstruksi teoretik.

A. Maksud Penelitian

Salah satu topik kajian dalam politik lokal adalah demokrasi dan kepemimpinan politik lokal. Secara teoretik, kualitas demokrasi lokal yang baik, akan menghasilkan kepemimpinan politik lokal yang baik. Kepemimpinan politik lokal yang baik tidak hanya memiliki legitimasi sosial dan politik, tetapi juga memenuhi legitimasi etika (Haus and Sweeting, 2006: 267–288).

Diletakkan dalam konteks demokrasi dan kepemimpinan politik lokal, penelitian ini bermaksud mendalami salah satu gejala dalam politik lokal yang dinilai bisa mengganggu kualitas demokrasi lokal. Gangguan terhadap kualitas demokrasi lokal berpotensi merintangi proses diperolehnya kepemimpinan politik daerah yang memiliki legitimasi sosial, legitimasi politik dan legitimasi etika. Gejala pengganggu demokrasi lokal yang dimaksudkan adalah praktik politik nepotisme, yang merupakan salah satu bentuk politik patronase. Politik patronase sendiri pada dasarnya merupakan salah satu varian korupsi politik.

Telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan menghasilkan pengetahuan deskriptif-interpretif tentang: (1) perilaku para aktor individual dan kolektiva membangun dan menggunakan jejaring untuk praktik politik nepotisme daerah, (2) praktik politik nepotisme daerah yang dilakukan oleh para aktor individual dan kolektiva daerah, dan (3) proses dan bentuk perlawanan warga masyarakat terhadap praktik politik nepotisme daerah.

Ketiga tujuan tersebut selanjutnya diintegrasikan menjadi sebuah model teoretik berdasarkan data lapangan (*grounded theoretical model*) tentang praktik politik nepotisme daerah, baik pada tingkat teori substantif tentang jejaring dan praktik politik nepotisme daerah, maupun pada tingkat teori formal tentang jejaring dan praktik politik patronase daerah.

B. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Berdasarkan hubungannya dengan teori, dikenal dua tujuan utama penelitian, yaitu: penelitian bertujuan menguji teori (*theory verification*), dan penelitian bertujuan menghasilkan teori (*theory generation*). Penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam uraian maksud penelitian, hendak menghasilkan teori berdasarkan data lapangan (*grounded theory*). Karena itu, pendekatan penelitian yang sejalan dengan maksud tersebut adalah pendekatan penelitian teori lapangan (*grounded-theory research*), sebagaimana dirintis oleh Glaser dan Strauss (1975). Secara metodologis, pendekatan penelitian teori lapangan ini menerapkan metode pengumpulan dan analisis perbandingan konstan (*constant comparative method*).

Gagasan teori lapangan, menurut Alvesson dan Skoldberg (2000: 12), memiliki dua akar utama, yaitu: interaksionisme-simbolik yang dianut oleh Strauss, dan positivisme-statistik yang dianut oleh Glaser (1992). Dalam perkembangannya, kedua ahli metodologi penelitian mengambil jalan berbeda sesuai kecenderungan epistemologik masing-masing (Strauss, 1987; Glaser, 1992).

Menurut Neuman (2000: 511), teori lapangan sendiri acapkali diartikan dalam dua pengertian. Pertama, teori lapangan diartikan sebagai seperangkat konsep atau kategori saling terkait yang dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan spesifik, rinci, dan nyata (*that is rooted in observations of specific, concrete details*). Kekhususan teori lapangan ini sering dibandingkan dengan teori agung (*grand theory*) yang dikembangkan lebih berdasarkan hasil penalaran logik, umum, dan abstrak.

Kedua, teori lapangan diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berkembang sebagai tanggapan terhadap metode kuantitatif dan kecenderungan untuk menguji teori agung yang sudah ada. Karena itu, keberadaan teori lapangan dipandang sebagai bagian dari usaha untuk menjembatani kesenjangan antara dunia teori dengan penelitian empirik (Jupp, 2006: 131).

Karakteristik utama penelitian teori lapangan adalah penerapan metode penalaran induktif. Artinya, peneliti bertolak dari pengamatan lapangan untuk kemudian bergerak menuju gagasan dan rampatan yang lebih abstrak. Ketika memulai kegiatannya, peneliti mungkin memiliki konsep yang masih samar-samar. Sejalan dengan kegiatan pengumpulan data, peneliti mempertajam dan

menghaluskan konsep, mengembangkan rampatan empirik, serta mengidentifikasi hubungan-hubungan awal. Jadi, peneliti membangun teori dari bawah ke atas (Neuman, 2000: 49).

Proses berteori dengan pendekatan induktif digambarkan oleh Neuman (2000: 50) dengan langkah awal mengumpulkan dan menganalisis realitas sosial empirik, dilanjutkan dengan proses pembentukan konsep dan generalisasi empirik, untuk dihubungkan satu sama lain guna menyusun teori lapangan. Proses ini dilakukan secara bolak-balik dan berulang-ulang antara pengumpulan data dan pembentukan konsep dan peneorian lapangan.

Langkah berikutnya adalah menulis teori substantif berdasarkan hasil peneorian lapangan. Dalam penelitian ini, teori substantif yang dimaksudkan adalah teori tentang politik nepotisme daerah. Setelah teori substantif lapangan tentang politik nepotisme daerah terselesaikan, peneliti melakukan transformasi menjadi teori formal. Secara lebih rinci, Neuman (2000: 50) menggambarkan bahwa langkah awal pengembangan teori secara induktif adalah melakukan pengumpulan data empirik (*empirical social reality*). Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti membuat kesimpulan umum dan membangun konsep atau kategori (*empirical generalization and concept formation*). Melalui penelusuran hubungan antar konsep atau kategori berdasarkan paradigma penyandian (*coding paradigm*), peneliti mengembangkan teori lapangan. Bentuk semula teori ini adalah teori substantif (*substantive theory*) yang bila dikembangkan lebih lanjut secara lebih abstrak, menjadi teori taraf menengah (*middle-range theory*). Langkah berikutnya adalah menghapuskan muatan

substantif konsep-konsep teoretik lapangan untuk merumuskan teori formal (*formal theory*). Setelah teori formal berhasil diintegrasikan ke dalam bangunan pengetahuan teoretik sejenis, berarti teori formal ini menyumbang pada pembentukan kerangka kerja teoretik umum (*theoretical framework*).

Sebuah penelitian untuk pengembangan teori berdasar data lapangan dapat dilaksanakan baik dalam bentuk studi multi-kasus maupun studi kasus. Mengutip definisi yang diberikan Yin (1984: 23) yang mengatakan bahwa studi kasus adalah suatu penelitian empiris yang menyelidiki suatu gejala kekinian dalam latar kehidupan nyata, dimana batas antara gejala dengan latar tidak secara jelas terbukti, serta menggunakan berbagai sumber bukti.

Sebagai gejala sosial kekinian, perilaku mendukung dan memilih atau menolak dan tidak memilih calon kepala daerah yang merupakan anggota keluarga kepala daerah yang masih menjabat, diselidiki dalam latar kehidupan nyata. Karena itu, disadari bahwa batas antara gejala dengan latar tidak begitu tegas. Artinya, ada pengaruh timbal-balik antara aspek-aspek kontekstual dengan gejala yang muncul. Bagaimana pun, perilaku mendukung dan memilih atau menolak dan tidak memilih calon kepala daerah bukan merupakan kasus sederhana. Karena itu, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam, peneliti membutuhkan pelbagai sumber sebagai bukti empirisnya.

Implikasi metodologis dari pemilihan metode ini adalah bahwa peneliti dituntut untuk: (1) memilih suatu kasus nyata tentang praktik politik nepotisme pemilihan kepala daerah, (2) senantiasa memperhitungkan aspek-aspek

kontekstual yang bertali-temali dengan gejala sosial yang diteliti, dan (3) selalu mencari dan menyajikan berbagai bukti empiris.

C. Pemilihan Lokasi dan Informan Penelitian

Seperti dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975: 27) bahwa setiap latar yang memenuhi minat substantif dan teoritis peneliti dan yang terbuka untuk diteliti mungkin saja dipilih sebagai situs penelitian. Memang cukup mudah untuk mengetahui latar mana yang bisa memenuhi minat substantif seseorang, tetapi justru sulit untuk memilih suatu latar kajian yang bisa memenuhi minat teoritis seseorang.

Mengacu pada fokus penelitian yang diajukan yang mencerminkan minat teoritis peneliti, maka situs penelitian dipilih berdasar kaidah sampel teoritis (*theoretical sampling*). Berbeda dengan sampel representatif, pertanyaan dasar sampel teoritis adalah: kelompok populasi, peristiwa, kegiatan yang diperlukan untuk diketahui perbedaan dimensi dan strateginya, memberikan gambaran tentang pengumpulan data selanjutnya? Dan untuk maksud teoritis apa hal itu dilakukan? Sehingga proses pengumpulan data ini dikendalikan oleh teori yang muncul (Strauss, 1990: 38-39). Dengan demikian, pertanyaan dasar sampel teoritis sebagaimana digunakan dalam penelitian ini adalah aktor, kelompok, peristiwa atau kegiatan mana yang bisa memberikan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan? Demikian pula, pada saat peneliti sudah melaksanakan kegiatan lapangan, senantiasa bertanya dari aktor, kelompok, peristiwa atau kegiatan mana lagi yang bisa memberikan data yang diperlukan

untuk menyepurnakan konsep dan teori sementara yang berhasil disusun berdasarkan data lapangan? Dengan demikian, proses penetapan lokasi, kasus, aktor, kelompok, peristiwa dan kegiatan dalam penelitian ini benar-benar dikendalikan oleh konsep dan teori yang muncul juga dari lapangan.

Sejalan dengan minat teoritis tersebut, maka kriteria pokok dalam pemilihan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kasus terpilih harus menampilkan: (1) fenomena jejaring politik nepotisme daerah, (2) fenomena praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah, dan (3) fenomena perlawanan rakyat terhadap praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah. Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, kasus penjarangan, pencalonan, dan pemilihan Kepala Daerah Kota Singapraja (2013) telah memenuhi kriteria sebagai sampel teoritis. Akhirnya, situs ini pula yang dipilih sebagai kasus contoh dalam mengembangkan pemahaman terhadap praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah .

Sejalan dengan prinsip sampel teoritis tersebut, subjek penelitian juga ditentukan dan diwawancarai berdasarkan kemungkinannya dalam memberikan data secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan informasi awal, peneliti menetapkan Cahya, sebagai informan pertama. Pilihan ini terutama didasarkan pada pengalaman subjek sebagai Sekretaris Kota Singapraja, sebagai tokoh yang pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja, sebagai Ketua Yayasan Aresi Indonesia Singapraja, sebagai doktor ilmu sosial yang pernah meneliti Pemilukada Kabupaten Singapanji, dan sebagai tokoh masyarakat yang memiliki

banyak informasi tentang kondisi sosial dan politik Kota Singapraja, serta memiliki relasi dengan berbagai lapisan masyarakat Kota Singapraja.

Perkenalan peneliti dengan Cahya, bermula dari saran pembina Matakuliah Penunjang Disertasi (MKPD), yang menyarankan kepada peneliti agar bisa mendapatkan disertasi tentang peran bandar politik dalam pemilihan kepala daerah. Melalui seorang teman yang tinggal di Kota Singapraja, peneliti bisa berhubungan langsung dengan Cahya. Meskipun ketika itu belum memasuki tahap pengumpulan data, peneliti mendapat kesempatan berdiskusi tentang berbagai persoalan berkaitan dengan wilayah, masyarakat, dan politik di Kota Singapraja.

Ketika peneliti sudah menetapkan Kota Singapraja sebagai lokasi penelitian dengan kasus praktik politik nepotisme dalam Pemilukada Kota Singapraja, peneliti mengaktifkan kembali hubungan dan meminta kesediaan Cahya untuk menjadi salah satu informan kunci penelitian. Hubungan dengan informan kunci ini berlangsung lancar karena beberapa faktor, di antaranya karena kesamaan almamater dan program studi, latar belakang keluarga peneliti sebagai putra seorang mantan kepala daerah, serta sejumlah orang yang sama-sama peneliti dan informan kenal. Terhitung sebanyak lima kali peneliti bertatap muka langsung dengan Cahya. Sebanyak dua kali pertemuan berlangsung di Surabaya, yaitu: rumah Cahya, dan di rumah putranya, Muhammad Rizky. Sebanyak tiga kali pertemuan berlangsung di Kota Singapraja, yaitu: dua kali di rumah Sakban Rosidi, dan satu kali di rumah kedua Cahya di Kota Singapraja. Semua pertemuan didahului dengan kesepakatan dan kesempatan informan. Berdasarkan lama waktu pertemuan, semua pertemuan berlangsung antara 1 hingga 3 jam.

Banyak sekali informasi dan data diberikan oleh Cahya, terutama berkenaan dengan peta kekuatan politik di Kota Singapraja, peran penting Raden Kumara dalam perpolitikan di Kota Singapraja, sosok Bagus Permadi sebagai politisi daerah dan sebagai atasan sekaligus pesaing dalam politik, sosok Wara Srikandi sebagai Ketua TP PKK dan politisi daerah, sosok Sofwan sebagai bawahan dan yang menggantikannya sebagai Sekretaris Kota Singapraja, sosok dan gaya berpolitik Balarama, Mohan Katelu dan Lesmono sebagai politisi daerah, serta sejumlah tokoh penting di Kota Singapraja. Melalui informan ini pula, peneliti mendapatkan gambaran dalam memilih subjek dan informan kunci berikutnya.

Titik waktu sangat penting bagi peneliti untuk bisa mengumpulkan data secara lebih intensif dan ekstensif adalah ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Singapraja disponsori oleh IBUraja Singapraja, sebuah perguruan tinggi tempat Wara Srikandi tercatat sebagai salah satu dosennya, berencana menyelenggarakan Dialog Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja sebagaimana banyak diinformasikan oleh media massa di Kota Singapraja, termasuk melalui media online (Sumber Data pada lampiran 6 3.1).

Begitu mendapatkan informasi tersebut, peneliti berusaha menemui Nurkholis Sunuyeko, Rektor IBUraja Singapraja agar bisa memperoleh undangan dan mengikuti secara penuh acara debat publik para calon walikota dan wakil walikota tersebut. Dalam pertemuan awal dengan Nur kholis Sunuyeko, yang ternyata juga menjadi salah satu panelis dalam debat publik tersebut, peneliti juga diperkenalkan dengan moderator debat publik, yaitu: (1) Sakban Rosidi, yang

sehari-hari juga mengajar di Program Pascasarjana IBUraja Singapraja, dan (2) Nurdin Halid, Ketua PWI Singapraja yang juga mengajar di IBUraja Singapraja, yang menjadi ketua panitia debat publik sekaligus pembawa acara debat publik.

Selanjutnya, malam sebelum acara debat publik, peneliti menghubungi pihak-pihak terkait agar tidak merasa canggung selama acara berlangsung. Sambutan baik diberikan oleh panitia, sehingga peneliti bisa menuju lokasi acara lebih awal. Agar tidak terkesan hanya merepotkan dan mementingkan diri sendiri, peneliti melibatkan diri membantu panitia, membantu awak media yang melakukan *shooting*, dan lain-lain yang diperlukan. Sebagai contoh, ketika para teknisi Singapraja TV dan JTV Singapraja sedang mengatur posisi kamera, peneliti sempat diminta untuk berperan dan mencoba baik panggung, mike penguat suara, mimbar untuk pidato dan sebagainya. Karena itu pula, peneliti sempat diambil gambarnya sedang berada di mimbar, bukan untuk berpidato, tetapi sekedar mencoba mike dan mimbar untuk persiapan *shooting* (Periksa Lampiran 1, Gambar 3.1).

Kesempatan mengikuti debat publik tersebut peneliti memanfaatkan untuk berkenalan dengan semua calon walikota, calon wakil walikota, para anggota tim sukses masing-masing, para panelis yang terdiri dari Nurkholis Sunuyeko (Rektor IBUraja), Khusnun Djuraid (Komisaris, dan Mantan Pimred Singapraja Post), dan Mudjia Rahardjo (Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Singapraja).

Dalam kesempatan tersebut pula, peneliti melakukan beberapa wawancara awal dan meminta kesediaan kepada sejumlah subjek dan informan agar diperkenankan untuk menghubungi kembali dalam rangka pengumpulan data

secara lebih lengkap. Hasilnya, semua subjek dan informan menyatakan kesediaan untuk diwawancarai dan bahkan akan membantu menghubungkan dengan subjek dan informan lain yang dinilai penting dalam memberikan informasi lebih rinci dan lengkap.

Sebagai contoh, setelah berbincang dengan Sakban Rosidi, peneliti diperkenalkan dengan para wartawan yang saat itu sedang meliput berita debat publik, di antaranya M. Ariful Huda dan Taufik, yang pada gilirannya berkenan membantu peneliti mengorganisasi diskusi kelompok terfokus bersama para wartawan Kota Singapraja di RM Batavia Kota Singapraja. Demikian juga, setelah melalui perkenalan singkat dalam debat publik tersebut, peneliti juga diterima secara terbuka untuk melakukan wawancara secara intensif dengan Khusnun Djuraid, di Kantor Singapraja Post.

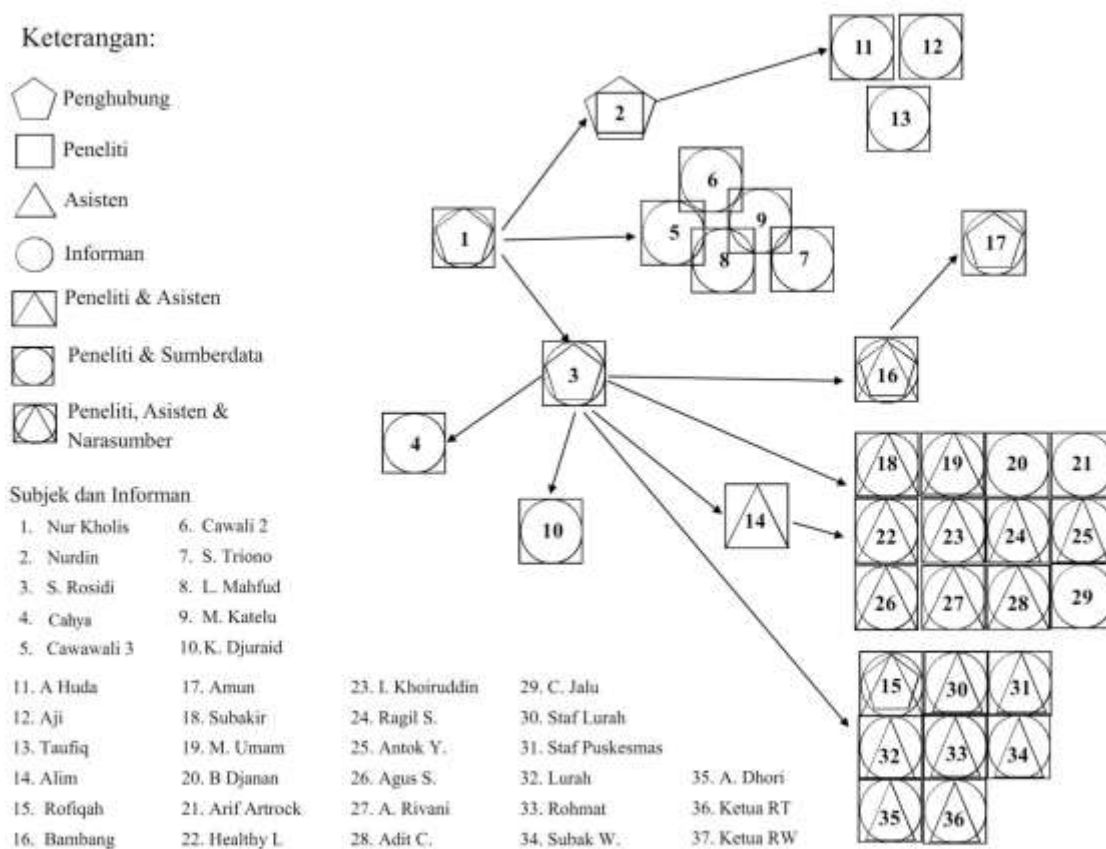
Ketika berada di Kampus IBUraja Singapraja, peneliti juga berkenalan dengan seorang mahasiswa bernama Adi Cita. Adi Cita, yang sehari-hari dipanggil Adit, adalah seorang aktivis mahasiswa yang karena aktivitasnya dipecat dari STIBA Singapraja dan akhirnya melanjutkan studinya di IBUraja Singapraja. Dari Adi Cita ini, peneliti berkenalan dengan Alim Harun Pamungkas, mantan Presma Universitas Negeri Singapraja yang memiliki jaringan dengan para aktivis mahasiswa dan dunia pendidikan di Kota Singapraja. Akhirnya, secara simultan sesuai dengan kesempatan dan tujuan, peneliti meminta kepada Adi Cita dan Alim Harun Pamungkas untuk menjadi asisten lapangan selama peneliti melakukan kegiatan lapangan. Sebagai contoh, bersama Adi Cita pula, peneliti bisa melakukan diskusi kelompok terfokus dengan para mantan aktivis

STIBA Singapraja yang karena aktivitas kritisnya dipecah dari STIBA Singapraja, sebuah perguruan tinggi swasta yang Ketua Yayasannya adalah Bagus Permadi.

Berdasarkan wawancara dengan Cahya, peneliti mengetahui bahwa salah satu informan penting berkenaan dengan M. Sofwan dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Singapraja, adalah Sakban Rosidi, karena pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singapraja dan Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kota Singapraja, serta Dewan Penasehat Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Singapraja, serta bergiat dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan di Kota Singapraja. Karena itu, kembali peneliti menghubungi yang bersangkutan agar bisa diperkenalkan dengan para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru sekolah, dan para seniman dan budayawan di Kota Singapraja.

Dari salah satu guru sekolah yang menjadi informan, peneliti diperkenalkan kepada pengurus PKK Kelurahan, Lurah, staf kelurahan, Ketua RT dan Ketua RW tempat guru sekolah tersebut bertempat tinggal. Guru sekolah dimaksud adalah, Ibu Rofiqah, yang bertempat tinggal di Kelurahan Tlogowaru, dan pernah menjadi Ketua TP PKK Kelurahan Tlogowaru. Bersama Ibu Rofiqah, pula peneliti bersama-sama menyaksikan proses pemungutan suara, Ketua RW dan Ketua RT yang juga menjadi petugas di salah satu TPS saat Pilwali Kota Singapraja, bertemu dengan Lurah, para pengurus PKK, dan warga sekitar Kecamatan Kedungkandang.

Proses pemilihan subjek dan pemerolehan informan dalam penelitian ini bisa disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut (Gambar 3.2):



Jejaring Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus

Gambar 3.2: Pemilihan Subjek dan Pemerolehan Informan

Tampak dalam gambar, penambahan dan wawancara mendalam terus dilakukan baik dengan satu informan maupun dengan menambah informan. Sebagai contoh, wawancara terakhir dilakukan oleh peneliti dengan Khusnun Djuraid., masih dilakukan hingga 10 Januari 2015, yang berarti duapuluh dua bulan sejak pertemuan peneliti dengan yang bersangkutan dalam forum debat publik calon walikota dan wakil walikota Singapraja (9 Mart 2012). Wawancara ini harus dilakukan oleh peneliti karena ternyata masih saja ada informasi baru

dari mantan redaksi Singapraja Post ini. Sedangkan wawancara dengan Cahya, sudah dihentikan sejak tanggal 26 Mei 2014, karena meskipun ditambah waktu wawancaranya, tidak diperoleh lagi informasi baru.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa lama wawancara dengan subjek atau informan serta penambahan subjek atau informan tetap dilakukan hingga mencapai kejenuhan teoritis (*theoretical saturation*), yakni ketika penambahan data dan analisis tidak lagi memberikan sumbangan bagi penemuan suatu kategori yang baru (Strauss, 1990: 21). Ini berarti bahwa dalam menentukan jumlah dan waktu berinteraksi dengan sumber data, peneliti menerapkan konsep sampling maksimum, yang oleh Lincoln dan Guba (1985: 102) dikemukakan sebagai upaya mendokumentasi semua variasi yang unik.

Dengan demikian, penambahan subjek penelitian tidak dilakukan lagi bila penambahan tersebut ternyata tidak bisa menambah ragam informasi baru. Karena itu, pendirian yang dianut peneliti adalah bahwa jumlah subjek bukan merupakan kriteria utama, sebab perhatian utama peneliti adalah ketuntasan perolehan informasi yang mencakup seluruh keragaman yang ada. Data dari informan dan sumber lain digunakan sebagai data pendukung dalam memahami praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah .

D. Kehadiran Peneliti dan Kegiatan Lapangan

Pemilihan kepala daerah yang ditandai dengan adanya keterlibatan kepala daerah yang masih menjabat yang mendukung anggota keluarganya, merupakan peristiwa yang cukup sensitif serta menuai perbedaan pendapat, baik menerima

maupun menolak. Karena itu, sejak awal peneliti menyadari situasi dilematik demikian. Di satu pihak, peneliti tidak diharapkan untuk membela salah satu pihak, baik kelompok yang menerima maupun menolak praktik politik nepotisme pemilihan kepala daerah.

Persoalan politik nepotisme dan perbedaan pendapat tentang politik nepotisme tersebut, perlu mendapat perhatian tersendiri bagi peneliti, karena para informan cenderung menginginkan dukungan sebagai “imbalan” atas informasi yang mereka berikan. Di lain pihak, apabila peneliti benar-benar memberikan dukungan kepada salah satu pihak, berarti peneliti harus mengambil risiko kehilangan kepercayaan dari pihak lain (Bogdan & Taylor, 1975: 50).

Dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut, maka cara memperoleh data yang terbaik bagi peneliti adalah dengan mendengarkan kedua belah pihak secara empatik, dalam arti berusaha memahami persoalan dari sudut pandang sumber data. Meskipun kadang bertindak seolah memberikan persetujuan terhadap pihak tertentu, peneliti juga berusaha memberikan perlakuan yang kurang lebih sama kepada pihak yang bertentangan, serta berusaha menghindari dari kesan bahwa dirinya berpihak kepada salah satunya.

Contoh paling mengesankan berkenaan dengan keharusan untuk bersikap netral dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah ketika peneliti harus mewawancarai salah satu mantan anggota organisasi kemahasiswaan yang berhaluan nasionalis-marhanenis yang bekerja di bagian pendataan tim sukses salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Singapraja. Karena yang bersangkutan adalah sejawat peneliti ketika masih menempuh pendidikan sarjana

ilmu politik, maka peneliti juga berusaha mendapatkan data lapangan dari yang bersangkutan. Ternyata, yang bersangkutan menunjukkan sikap penuh curiga dan menganggap peneliti sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon kepala daerah yang lain.

Dengan agak susah payah peneliti berusaha menjelaskan posisi penulis sebagai peneliti yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memang tidak mendapatkan informasi verbal yang berarti. Namun demikian, justru dari reaksinya yang berlebihan terhadap peneliti yang ketika itu datang bersama salah satu asisten lapangan, peneliti justru bisa menangkap adanya kepanikan dalam kubu pasangan calon kepala daerah ini. Karena itu, dengan sabar peneliti mendengarkan keluhan dan kepanikannya tentang sebuah video yang diedit dan diunggah kembali di *Youtube* oleh Yudi Aresi, yang dalam video tersebut tampak Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani memberikan pesan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor 3 (*Ojo lali, pilih nomor telu*).

Dalam kenyataannya, video tersebut hanya unggahan ulang dari aslinya yang diperuntukkan bagi warga Jawa Tengah agar memilih pasangan calon gubernur nomor 3, Ganjar Pranowo. Namun demikian, karena video tersebut diunggah ulang dengan menyertakan nama pengunggah yang membawa nama daerah Kota Singapraja, maka banyak warga PDIP yang beranggapan bahwa video tersebut ditujukan kepada warga PDIP Kota Singapraja.

Dari kasus tersebut, tampak bahwa dalam berkegiatan lapangan, peneliti harus menyadari kedudukannya sebagai piranti kunci karena hadir sendiri dan

berperan-serta dalam kegiatan lapangan, sehingga semakin peka dan dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan penelitian. Dalam menjalankan kegiatan lapangan, peneliti berusaha memahami dan menghayati kenyataan bahwa dirinya ibarat berjalan pada seutas tali. Jadi peneliti sendiri harus bisa merasakan apabila dia kehilangan keseimbangan (Bogdan dan Taylor, 1975: 50), dan juga ketika informan telah mempersepsi secara salah baik terhadap suatu kenyataan maupun peran peneliti yang bersifat netral dalam persaingan antar calon kepala daerah.

Selama melakukan kegiatan lapangan, peneliti mempertimbangkan kemungkinan bahwa kehadirannya bisa mempengaruhi tindakan para pelaku dan informan. Karena itu, seringkali peneliti harus melakukan teknik pengamatan terselubung (*covert observation*) agar subjek dan atau informan tetap bersikap dan berperilaku wajar. Walaupun demikian, peneliti menyadari bahwa teknik pengamatan terselubung bisa merusak reputasi para peneliti yang pada gilirannya menghalangi peneliti lain untuk bisa memasuki lapangan (Erikson, 1970: 254).

Sebagai gambaran adalah ketika peneliti berusaha mendapatkan informasi dari salah satu anggota tim sukses pasangan calon kepala daerah, subjek penelitian begitu sangat berhati-hati dalam memberikan informasi karena khawatir apabila informasi yang diberikan justru digunakan untuk kepentingan pasangan calon kepala daerah yang lain. Peneliti seringkali dianggap sebagai seseorang menyaru sebagai peneliti demi kepentingan lawan politiknya. Berulang kali peneliti harus menjelaskan bahwa posisinya adalah sebagai peneliti, yang bersikap netral dan sama sekali tidak menggunakan data dan informasi yang diperoleh untuk

kepentingan selain kepentingan ilmiah. Kejadian ini berlangsung saat musim kampanye bagi para calon kepala daerah.

Tidak hanya ketika melaksanakan pengamatan terselubung, peneliti menghadapi kesulitan di lapangan. Pada saat peneliti memilih untuk melakukan pengamatan terbuka (*overt observation*) dan dengan jujur menyatakan kalau sedang melakukan penelitian, gangguan paling serius yang dihadapi adalah hilangnya kewajaran sikap dan perilaku subjek dan atau informan penelitian. Karena itu, secara selektif dan hati-hati peneliti memilih kepada siapa peneliti berterus terang, dan kepada siapa lagi peneliti memilih untuk melakukan pengamatan terselubung atau wawancara tanpa menyebutkan maksud sebenarnya. Salah satu informan kunci yang karena memiliki kecenderungan untuk menolak diwawancarai peneliti, adalah kepada Healthy Lukistiono. Beruntung peneliti didampingi oleh tetangga depan rumah informan yang cukup disegani oleh yang bersangkutan, sehingga wawancara terselubung berlangsung nyaman dan terbuka karena yang bersangkutan sama sekali tidak meyakini bahwa perbincangan tersebut telah direncanakan dan bahkan direkam dengan baik.

Selanjutnya, karena strategi yang dipilih adalah studi kasus, maka secara konsisten, kegiatan lapangan dirancang untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam konteks ini pula, peneliti lebih menempatkan diri sebagai piranti pengumpulan data yang tanggap dan peka sekaligus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan penelitian.

Secara ringkas, ada tiga sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, data dokumen didekati dengan teknik dokumenter. Secara teknis, peneliti mencatat, menyederhanakan, menggolongkan, dan mengolah data yang berupa dokumen. Ini mencakup, misalnya, data demografi, sosial, politik, budaya dan ekonomi Kota Singapraja. Selain data yang bersifat umum tersebut, peneliti juga mengumpulkan hampir seluruh iklan dan pemberitaan tentang Pemilukada Kota Singapraja, dan terutama yang bersangkutan dengan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono. Sebagaimana tampak dalam paparan dan analisis data penelitian, sejumlah berita dan iklan politik tersebut disertakan dalam uraian tidak semata-mata karena isinya, melainkan juga untuk menunjukkan betapa besar pemberitaan tentang para calon kepala daerah, dan betapa dominan pemberitaan dan iklan untuk pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono.

Tentu saja, berbagai data tersebut, terutama data hasil wawancara, cukup sulit bisa diperoleh tanpa kepercayaan dari masing-masing pihak. Para subjek dan informan harus yakin bahwa data tersebut tidak digunakan untuk menyalahkan mereka. Sebagai contoh adalah data wawancara dan berbagai atribut kampanye pasangan Wara Srikandi dan Wibisono. Setelah berhasil melakukan pendekatan, dengan sering berkunjung, dan akhirnya diperkenankan tinggal sementara di rumah Ibu Rofiqah, selama kegiatan penelitian.

Setelah bergaul dan berinteraksi cukup lama, akhirnya seringkali tanpa diminta pun peneliti dibantu mendapatkan berbagai atribut kampanye, mulai dari kain batik, fulpen, kaos, kalender, dan arsip Harian Surya dan Koran Pendidikan,

sejak awal sosialisasi Wara Srikandi, hingga berpasangan dengan Wibisono, masa kampanye, sampai dengan setelah penghitungan suara dan penetapan calon walikota dan wakil walikota terpilih. Tidak hanya itu, peneliti juga diperkenalkan dan diantarkan untuk bertemu langsung dengan sejumlah informan dan subjek yang memiliki hubungan dengan Wara Srikandi dan Wibisono. Tentu saja, selama peneliti bertempat tinggal sementara pada keluarga tersebut, peneliti juga harus menyesuaikan diri dengan seluruh kebiasaan sehari-hari keluarga tersebut, serta melibatkan diri dalam sejumlah kegiatan masyarakat setempat.

Pada awalnya, peneliti merasa kesulitan mendapatkan arsip-arsip pemberitaan dan iklan para calon walikota dan wakil walikota, sehingga peneliti tidak menggunakan tolok-ukur yang terlalu tinggi. Rencananya, bila memang oleh yang memiliki tidak diperkenankan untuk difoto-copy, misalnya, peneliti cukup melihat, membaca dan mencatat secara ringkas isi dokumen atau arsip tersebut. Bila ternyata tetap tidak diperkenankan, maka peneliti cukup meminta informasi tentang isinya. Namun demikian, karena peneliti berhasil membaurkan diri di lingkungan penelitian, akhirnya justru dari Ibu Rofiqah, peneliti mendapatkan arsip asli sejumlah koran dan berbagai atribut kampanye Wara Srikandi.

Kedua, data peristiwa dan perilaku nyata warga masyarakat didekati dengan teknik pengamatan. Secara teknis, peneliti mencermati, menyederhanakan, menggolongkan dan mengolah data peristiwa dan tindakan sehari-hari yang secara logik bertali-temali dengan gejala perebedaan pandangan tentang pencalonan anggota keluarga kepala daerah yang masih menjabat.

Tentu saja, dalam melakukan pengamatan ini, peneliti harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa kehadirannya bisa mempengaruhi tindakan verbal dan behavioral para subjek. Karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, peneliti dihadapkan pada masalah etika yang dilematik, antara cara pengamatan terselubung dengan pengamatan terbuka (*overt versus covert observation*). Berkenaan dengan proses pengamatan ini, peneliti yang sudah sejak masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah bertempat tinggal sementara di Kota Singapraja, menjadi semakin mengenal warga masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan warga Kota Singapraja. Di sekitar tempat tinggal sementara, peneliti sudah saling mengenal dengan warga sekitar, sehingga ketika musim kampanye dan saat pemungutan suara, sama sekali tidak ada yang mempertanyakan mengapa peneliti mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara dan di TPS, rekapitulasi di Kelurahan, rekapitulasi di Kecamatan, hingga rekapitulasi dari KPU Kota Singapraja.

Ketiga, data realitas sosial dan simbolik sebagaimana dipahami dan dihayati oleh para pelaku tindakan, didekati dengan teknik wawancara mendalam. Secara teknis, berbekal panduan umum wawancara, peneliti bertanya-jawab secara informal, menggolongkan dan mengolah data hasil tanya-jawab yang mencerminkan penghayatan, pemahaman dan pengalaman para pelaku berkenaan dengan pencalonan keluarga kepala daerah yang masih menjabat.

Agar kriteria koherensi dan korespondensi terpenuhi, maka butir-butir pertanyaan longgar sebagai panduan pengumpulan data, dikembangkan berdasarkan perspektif teoritis yang digunakan dan permasalahan yang diajukan.

Secara praktis, meskipun panduan longgar ini digunakan dalam pengamatan, telaah dokumen maupun wawancara, peneliti lebih mengandalkan kepekaan dan keluwesan dirinya sebagai piranti utama pengumpulan data sebagaimana secara umum telah diuraikan.

Seluruh hasil wawancara dan pengamatan direkam dan atau direkonstruksi berdasarkan ingatan menjadi berkas-berkas catatan lapangan (*field-notes*). Selanjutnya, segera setelah catatan lapangan ditulis, peneliti membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik baik untuk mempertajam pumpun penelitian, maupun memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut. Sejumlah besar rekaman audio peneliti peroleh terutama dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Karena keterbatasan waktu dan ketidak-cakapan penulis untuk membuat transkrip sendiri dari hasil rekaman tersebut, maka peneliti meminta bantuan Saudari Oktie Vieranda, seorang pemilik biro jasa pengetikan dan penterjemahan untuk membuat transkripnya. Dalam kenyataannya, transkrip hasil wawancara atau diskusi sangat sulit dibaca langsung oleh mereka yang tidak mengetahui konteks berlangsungnya wawancara. Karena itu, segera setelah transkrip wawancara mentah terselesaikan, peneliti melakukan penyuntingan berdasarkan ingatan penulis terhadap konteks dan jalannya wawancara. Dengan cara demikian, hasil wawancara dan diskusi bisa dimengerti dengan baik, dan dijadikan sebagai bukti empirik dalam melakukan paparan dan analisis data penelitian.

Bersamaan kegiatan lapangan, peneliti melakukan analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*). Sedangkan setelah kegiatan

lapangan berakhir, peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 81), ketika peneliti menggali tema-tema dan hipotesis sepanjang kegiatan penelitian, maka pada tahap pasca kegiatan penelitian lapangan, peneliti memusatkan perhatian pada pengolahan dan penafsiran data.

Dengan strategi demikian, sebenarnya peneliti tidak memisahkan sama sekali antara kegiatan pengumpulan dengan pengolahan data. Model demikian oleh Miles dan Huberman (1987) disebut sebagai model analisis interaktif, yaitu semacam daur saling terkait antara kegiatan: (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan data, (3) pemaparan data, dan (4) penarikan dan pengujian simpulan.

Sebagai contoh, ketika laporan awal penelitian ini telah disusun, ternyata masih ada beberapa hal yang menurut peneliti perlu dilengkapi dengan bukti-bukti tambahan. Dalam hal ini, misalnya, menyangkut peran penting Raden Kumara dan tentang hubungan ekonomi antara media massa dengan pasangan calon kepala daerah, dilengkapi dengan cara yang berbeda. Pada kasus Raden Kumara, peneliti hanya perlu membaca ulang secara cermat sejumlah hasil wawancara dan menambahkannya sebagai bahan analisis, sedangkan pada kasus hubungan ekonomi media massa dengan pasangan calon kepala daerah, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Khusnun Djuraid, komisaris Singapraja Post yang banyak mengetahui tentang hubungan antara para pejabat politik dengan media massa dan hubungan antara media massa dengan pasangan calon kepala daerah. Berdasarkan wawancara terakhir itu pula, dapat diketahui dengan pasti bahwa

pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono memang membelanjakan anggaran sangat besar untuk memperkerjakan tim media center dan membayar biaya iklan dalam berbagai bentuk.

E. Kelayakan data

Kelayakan data penelitian ini diupayakan melalui penerapan empat kriteria sebagaimana dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu derajat: (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), serta (4) kepastian (*confirmability*).

Derajat kepercayaan data diupayakan melalui teknik: (1) perpanjangan kegiatan lapangan, (2) ketekunan dalam kegiatan lapangan, (3) penerapan teknik triangulasi, (4) pelibatan sejawat kritis, (5) kecukupan rujukan, (6) telaah kasus penyanggah, dan (7) pemeriksaan kesesuaian oleh warga.

Berdasarkan catatan penulis, pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan selama hampir dua tahun, atau tepatnya 23 bulan. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 1 Februari 2013, dengan informan pertama Cahya, di Perumahan Bharata Jaya Surabaya, dan berakhir 10 Januari 2015, dengan informan terakhir kepada Nurkholis Sunuyeko., di Perumahan Dirgantara Permai Kota Singapraja. Bila dikaitkan dengan jumlah subjek atau informan yang diwawancarai, memang tampak cukup lama untuk setiap subjek atau informan. Ini menunjukkan bahwa selain peneliti menerapkan prinsip pemenuhan kejenuhan teoretik, juga senantiasa berupaya meningkatkan derajat kepercayaan dengan memperpanjang kurun waktu kegiatan lapangan dan interaksinya dengan subjek dan informan.

Banyak sekali ragam dan jumlah satuan data yang peneliti peroleh selama kurun hampir dua tahun kegiatan lapangan. Selama kegiatan pengumpulan data, peneliti senantiasa mencatat, merekam audio dan membuat serta menyunting transkrip wawancara, mengumpulkan dan menyimpan material yang relevan, serta mengumpulkan, mengkopi secara elektronik, dan mengkategorikannya secara sistematis, serta tentu saja pengamatan lapangan dan proses kegiatan terkait Pemilukada Kota Singapraja, dan para calon walikota dan wakil walikota Singapraja. Hingga buran kedua laporan penelitian ini ditulis, semua jejak lapangan tersebut masih tersimpan dengan baik dan bisa digunakan setiap saat. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang secara praktik dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan data melalui peningkatan ketekunan pengamatan atau pengumpulan data.

Melalui perpanjangan (*prolonged engagement*) dan ketekunan (*persistent observation*) dalam kegiatan lapangan, peneliti tidak hanya bermaksud memperoleh informasi menyeluruh, melainkan juga informasi mendalam. Dengan perpanjangan kegiatan lapangan, ketercakupan informasi bisa diupayakan. Sebaliknya, melalui ketekunan kegiatan lapangan, aspek kedalaman informasi perolehan bisa dicapai.

Pelibatan sejawat kritis (*critical peer debriefing*) dilakukan dengan cara menyajikan sejumlah temuan dan pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ke hadapan rekan-rekan sejawat peneliti. Penyajian itu sendiri bermaksud untuk memperoleh kesempatan agar ditanggapi atau bahkan disanggah. Secara praktis, kegiatan ini tidak hanya dilakukan dengan memaparkan temuan-temuan maupun

refleksi teoritis penelitian ini dalam pertemuan tatap-muka dengan rekan sejawat peneliti, melainkan juga berupaya mempublikasikannya dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal akademik, dan artikel analitik di surat kabar.

Sebagai bagian dari pelibatan sejawat kritis tersebut, peneliti telah menyajikan temuan sementara dalam dua forum. Pertama, forum diskusi kelompok terfokus bersama para wartawan, yang diselenggarakan di RM Batavia Kota Singapraja. Forum ini, selain dihadiri oleh para wartawan yang meliput kegiatan Pilkada Kota Singapraja 2013, juga dihadiri oleh tiga orang dosen perguruan tinggi di Kota Singapraja, serta empat orang pemerhati politik Kota Singapraja.

Kedua, forum seminar sejawat penelitian diselenggarakan tanggal 12 Februari 2015 bertempat di Siti Hinggil Taman Mini Majapahit (MWT), Kompleks Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto. Seminar ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Selaku peneliti, penulis menyajikan ringkasan temuan penelitian dengan menghadirkan tiga pembahas utama, yaitu: (1) Cahya, sebagai pembahas teori, (2) Sakban Rosidi, sebagai pembahas metodologi, dan (3) Khusnun Djuraid., sebagai pembahas umum. Selain sejumlah peserta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), seminar juga dihadiri oleh Rektor Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, Machmoed Zain, serta beberapa partisipan dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial dan politik, serta beberapa sarjana dan seorang doktor ilmu hukum (Periksa Lampiran 10). Selain mempersoalkan konsep dan teori yang digunakan dan ditemukan dalam penelitian

ini, seminar juga mempersoalkan proses pengumpulan dan pengolahan data. Pembahas teori, misalnya, meminta klarifikasi tentang judul besar korupsi politik serta kaitannya dengan politik patronase, politik dinasti, politik nepotisme, dan politik kolusionisme. Pembahas metodologi, mempersoalkan kedudukan foto dan gambar, apakah sebagai data penelitian atau dokumentasi kegiatan penelitian, serta bagaimana metode perbandingan konstan (*constant comparative method*) dilaksanakan sejalan dengan tiga tahapan penyandian. Pembahas umum lebih banyak menyoroti soal *setting* Kota Singapraja, baik secara sosial, budaya, maupun politik, serta posisi dan validasi bahan-bahan yang berasal dari media massa.

Pemenuhan kriteria kecukupan rujukan (*referential adequacy*) dilakukan dengan senantiasa menyandingkan, membandingkan, dan menandingkan data tambahan terhadap data utama. Ketika diperoleh data yang secara sekilas kurang berkaitan dengan fokus penelitian, maka data tersebut tidak dengan serta-merta dibuang. Dengan pertimbangan data tersebut diperoleh dari latar peristiwa yang sama, tentu data seperti ini masing bertali-temali dengan gejala sosial yang menjadi fokus penelitian. Data tambahan ini pula yang diperlakukan sebagai rujukan bagi kesimpulan penelitian.

Tampak dari paparan hasil penelitian, setiap kesimpulan yang ditarik senantiasa didasarkan pada sejumlah data rujukan yang cukup. Kesimpulan bahwa pasangan Wara Srikandi dan Wibisono memang membayar dan menggunakan media massa untuk kegiatan kampanye, misal, didasari pada analisis perbandingan berita di Singapraja Post, advertorial Harian Surya, iklan berbentuk

komik di Harian Surya, berita online *Ken Dedes Media Center*, hasil diskusi kelompok terfokus dengan sejumlah wartawan, wawancara dengan wartawan JTV Singapraja, dan terakhir wawancara klarifikasi dengan komisaris Singapraja Post.

Analisis kasus penyanggah (*negative case analysis*) dilakukan dengan mencari dan menelaah sejumlah gejala yang tampak tidak mendukung kesimpulan penelitian. Telaah itu sendiri bertujuan menghaluskan kesimpulan, sehingga diperoleh kepastian bahwa kesimpulan tersebut benar secara umum. Bila ternyata tidak berhasil diperoleh kesimpulan yang berlaku umum, paling tidak peneliti perlu memberikan seperangkat bukti empiris untuk menjelaskan perkecualian tersebut.

Salah satu contoh paling menonjol tentang adanya kasus negatif, dalam arti tidak mendukung kesimpulan umum, bahkan saling bertentangan adalah tentang hubungan Wara Srikandi dengan Partai Demokrat. Melalui pernyataan Bagus Permadi, berita terpublikasi memang menyatakan bahwa Wara Srikandi memutuskan hubungan dengan Partai Demokrat dan memutuskan untuk mencalonkan diri melalui PAN dan berpasangan dengan Wibisono. Isi berita ini bertentangan dengan informasi lain yang menyatakan bahwa Partai Demokrat memang tidak akan memberikan rekomendasi bagi Wara Srikandi, yang berarti juga bahwa Partai Demokrat memiliki calon walikota sendiri. Berkenaan dengan perbedaan informasi ini, peneliti menggali informasi lebih mendalam kepada Cahya, yang memiliki hubungan dekat dan bertemu secara khusus dengan dua orang DPP Partai Demokrat yang mendapat kewenangan memutuskan siapa calon walikota Singapraja dari Partai Demokrat, yaitu: Soekarwo, Wakil Ketua Umum

DPP Partai Demokrat yang juga Gubernur Jawa Timur, dan Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang mewakili Dapil Singapraja Raya. Akhirnya, sebagaimana disajikan dalam paparan hasil penelitian, bisa dijernihkan duduk persoalannya, termasuk keterkaitannya dengan, Arif Darmawan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Singapraja yang ketika itu telah melakukan sosialisasi berpasangan dengan Wara Srikandi, dengan slogan "Bundar" (Bunda Wara Srikandi dan Arif Dharmawan).

Pemeriksaan oleh warga (*member check*) dilakukan dengan mengemukakan temuan penelitian untuk diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya oleh para subjek penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tingkatan. Pada tingkatan pertama, pemeriksaan dimaksudkan sebagai upaya memperoleh konfirmasi mengenai data mentah dari para subjek penelitian. Pada tingkatan kedua, pemeriksaan dimaksudkan sebagai upaya negosiasi temuan dan kesimpulan sementara penelitian ini.

Juga tampak pada paparan hasil penelitian, untuk mendapatkan jawaban sebenarnya dari suatu pertanyaan analitik, peneliti menggunakan banyak sumber data, baik sejenis maupun yang berbeda jenis. Data dari salah satu media massa dibandingkan dengan data dari media massa lain, data dari wawancara seorang informan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan informan yang berbeda. Perbandingan demikian dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan anggota (*member check*). Dalam praktiknya, kegiatan pemeriksaan anggota ini dilakukan secara simultan dengan kegiatan triangulasi, yakni memeriksa kebenaran suatu informasi dengan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Menurut Lincoln dan Guba (1985: 195), adalah mustahil untuk menggambarkan atau menjelaskan semua hal yang diketahui seseorang dalam bentuk bahasa. Sebab, tentu masih ada beberapa hal yang hanya bisa dimengerti setelah dialami. Secara khusus, bagian pemahaman yang tidak mungkin dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk bahasa itu disebut pengetahuan tak-terungkap (*tacit knowledge*). Ini sejalan dengan pernyataan Polanyi (1972: 12), bahwa pengetahuan tak terungkap muncul sebagai pengalaman kita sendiri, yang tidak memiliki sifat publik dan objektif, sebagaimana dicirikan oleh pengetahuan terungkap. Walaupun menjadi milik peneliti semata, dan mungkin kehilangan ciri publik dan objektif pengetahuan terungkap, pengetahuan tak-terungkap mempunyai kedudukan sangat penting dalam keseluruhan bangunan pengetahuan. Secara nyata pengetahuan tak terungkap merupakan prinsip utama dari semua jenis pengetahuan. Karena itu, penolakan terhadap jenis pengetahuan ini berarti pula penolakan segala bentuk pengetahuan.

Berkenaan dengan itu, yang paling mungkin dilakukan oleh peneliti agar hasil kerjanya bisa dipahami secara utuh oleh pembacanya adalah dengan menyajikannya sebagai pemaparan rinci (*thick description*), sehingga bukan sekedar memaparkan apa yang tampak, melainkan menampakkan lapisan-lapisan struktur yang bermakna agar bisa ditafsirkan dan dipahami secara mendalam, sebagaimana dianjurkan oleh Geertz (1973). Tidak hanya dalam rangka memahami dan menafsirkan, melalui paparan mendalam ini pula, peneliti bisa meningkatkan transferabilitas temuan dan kesimpulan penelitiannya. Artinya, dengan memahami segala aspek yang tercakup dan terkait dengan temuan

penelitian, pembaca bisa membayangkan dalam konteks apa temuan tersebut bisa diberlakukan.

Dengan demikian, agar tidak sekedar menghasilkan pengetahuan tak-terungkap, peneliti bertanggung-jawab untuk menyediakan dasar secukupnya bagi orang lain, agar mereka bisa merenungkan kemungkinan penerapan dan pemberlakuan kesimpulan penelitian ini pada latar kajian yang lain. Lagi pula, sebagaimana telah dikemukakan, penelitian ini lebih merupakan studi kasus contoh daripada studi kasus unik. Secara praktis, teknik ini dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian secara cermat dan selengkap mungkin, sehingga latar dan pokok permasalahan menjadi sangat jelas. Ini berarti pula bahwa peneliti menyediakan seperangkat bahan yang dibutuhkan oleh para pembaca agar dapat memahami dan merenungkan penerapan temuan-temuan penelitian ini.

Terkait erat dengan teknik uraian mendalam tersebut, derajat kebergantungan dan kepastian (*dependability and confirmability*) diupayakan dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan kebergantungan dan kepastian. Implikasinya, peneliti tidak hanya memaparkan proses dan hasil penelitian, tetapi juga jejak-jejak kegiatan penelitiannya. Dengan demikian, melalui kegiatan penelusuran jejak-jejak lapangan, siapa pun dapat menentukan apakah kesimpulan yang ditarik telah didasarkan pada bukti-bukti empiris yang memadai. Secara praktis, selain dalam bentuk laporan, penelitian ini juga menyediakan jejak-jejak kegiatan lapangan dalam bentuk rekaman audio, rekaman visual, transkrip wawancara, catatan lapangan hasil pengamatan, beserta sejumlah bahan dokumenter yang diperoleh dari kegiatan lapangan.

Akhirnya, karena dilaksanakan dalam rangka penulisan disertasi, maka proses pemeriksaan kebergantungan dan kepastian penelitian ini sama sekali menjadi wewenang promotor, ko-promotor dan dewan penguji, yang secara akademik memiliki kewenangan dan kelayakan sebagai pemeriksa kebergantungan dan kepastian penelitian ini. Pemeriksaan kebergantungan pertama dilakukan oleh Promotor dan Ko-Promotor sepanjang proses penelitian dan penulisan laporan. Pemeriksaan kebergantungan kedua, dilakukan dalam Ujian Kelayakan Naskah Disertasi (4 November 2014) oleh tujuh anggota Dewan Penguji Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Pemeriksaan ketiga dilakukan dalam forum Ujian Disertasi Tahap I, sedangkan pemeriksaan keempat dilakukan dalam forum Ujian Disertasi Tahap II.

F. Analisis Data

Sering disalah-artikan, bahwa ketika melakukan penelitian kualitatif, peneliti harus ke lapangan dengan kepala kosong (*blank head*). Menurut hemat peneliti, ungkapan demikian tidak hanya mustahil, tetapi juga naif sekali. Artinya, kalau seseorang memulai penelitian dengan kepala kosong, maka ketika mengakhiri penelitian pun mungkin masih berkepala kosong (*blank in, blank out*).

Menurut Strauss (1990: 20), tak seorang pun bisa terbebas sama sekali dari data pengalaman (*experiential data*), yaitu: data yang ada di kepala, yang disimpulkan dari pengalaman pribadi peneliti, dari penelitian, dan dari pengalaman membaca bahan-bahan pustaka. Karena itu, sambil menyadari bahwa dalam kepala peneliti juga terdapat data perolehan dari pengalaman pribadi,

penelitian dan pengalaman membaca bahan pustaka, maka sikap ilmiah yang dianggap terbaik adalah meneliti dengan pikiran terbuka (*open mind*). Artinya, segala pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki peneliti tidak diperlakukan sebagai hipotesis yang harus diuji secara apriori.

Dengan demikian, walaupun semacam hipotesis sudah mengendap di kepala, peneliti tidak memperlakukannya sebagai pemikiran yang harus dibuktikan, melainkan justru harus disempurnakan dan diperhalus melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Dalam konteks ini pula, bisa dimengerti bila Strauss (1990: 11) mengemukakan bahwa data pengalaman dipandang sebagai data esensial, karena data ini tidak hanya memberi tambahan kepekaan teoritis, tetapi juga memberikan gagasan tambahan yang kaya untuk membuat perbandingan, menemukan keragaman, dan penarikan sampel secara luas berdasarkan pertimbangan teoritis.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 79), analisis data menunjuk pada suatu upaya untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesis atau gagasan sebagaimana ditampilkan oleh data dan suatu upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap tema dan hipotesis tersebut. Berangkat dari pengertian demikian, berikut diuraikan secara ringkas strategi pengolahan data yang dipilih dan dilakukan dalam penelitian ini.

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi tema-tema, mengembangkan dan menunjukkan dukungan terhadap hipotesis atau pemikiran, maka jelas sekali bahwa pengolahan data bukan sekedar pekerjaan teknis, apalagi merutin. Sekaligus ini berarti bahwa, sesuai dengan sifat dasar permasalahan yang

diajukan, peneliti bisa memilih strategi analisis yang dipandang paling cocok dengan tujuan kajian.

Berkenaan dengan itu, pengolahan data penelitian ini menerapkan metode perbandingan konstan (*constant comparative method*) dengan tiga tahapan penyandian sebagaimana dianjurkan oleh Strauss (1990: 28-38). Sebagaimana diuraikan lebih teknis oleh Boeije (2002: 395), perbandingan yang harus dilakukan mencakup: (1) perbandingan dalam satu wawancara tunggal, (2) perbandingan antar wawancara dalam kelompok yang sama, (3) perbandingan wawancara dari kelompok yang berbeda, (4) perbandingan berpasangan pada tingkat pasangan kelompok (yang saling berinteraksi), dan (5) perbandingan antar pasangan kelompok.

Perbandingan-perbandingan tersebut senantiasa dilakukan sejalan dengan tiga tahapan penyandian. Perbandingan dalam satu wawancara tunggal berhubungan dengan penyandian terbuka (*open coding*), yang bertujuan meringkas inti wawancara dan menemukan konsensus bagaimana interpretasi terhadap bagian-bagian data dilakukan. Perbandingan antara wawancara dalam kelompok yang sama berhubungan dengan penyandian pokok (*axial coding*), yang bertujuan merumuskan kriteria untuk membandingkan wawancara, serta mengembangkan hipotesis tentang jenis dan pola-pola tertentu. Perbandingan wawancara dalam kelompok berbeda, berhubungan dengan triangulasi sumber data (*triangulating data sources*), yang bertujuan utama menverifikasi kesimpulan sementara dari kelompok yang diwawancarai pada kelompok tertentu. Perbandingan berikutnya berhubungan dengan penyandian terpilih (*selective*

coding), yang bertujuan memantapkan profil masing-masing kategori dan hubungannya dengan kategori yang lain. Dalam hal ini, peneliti sudah memasuki tahap teorisasi berdasarkan data lapangan (*grounded theorizing*). Karena proses teorisasi dilaksanakan secara induktif, maka sebagaimana diisyaratkan oleh Strauss (1990: 33) dan dikuatkan oleh Alvesson dan Skoldberg (2000), dikenal ada dua jenis kategori, yaitu: kategori konstruk sosiologis dan kategori konsep nyata lapangan (*in vitro codes and in vivo codes*).

Sebagai gambaran bagaimana metode perbandingan konstan dilakukan secara simultan dengan proses penyandian terbuka (perbandingan tipe 1), penyandian pokok (perbandingan tipe 2), triangulasi sumber data (perbandingan tipe 3), dan penyandian terpilih (perbandingan tipe 4 dan 5), pada awalnya peneliti hanya melakukan wawancara dengan sejumlah subek dan informan mengenai kriteria apa yang penting dalam menilai strategi mengikuti Pilkada. Wawancara ini didasarkan pada asumsi bahwa melakukan praktik politik nepotisme merupakan strategi tindakan bertujuan, sehingga yang muncul adalah apa sebenarnya tujuan dari praktik politik nepotisme?

Tentu saja siapa pun mengetahui bahwa tujuan akhir dari strategi tindakan tersebut adalah memenangkan Pilkada dan berhasil menjadi Kepala Daerah. Namun demikian, sebagaimana setiap tujuan akhir, senantiasa diawali atau diprasyarati oleh sejumlah keberhasilan dalam tujuan antara. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, berbagai pendapat, informasi dan data bermunculan. Cara pandang yang paling umum adalah mengadopsi begitu saja tahapan-tahapan yang

ada dalam penyelenggaraan Pilkada sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kota Singapraja.

Dalam analisis lanjutan, ternyata tahapan-tahapan keberhasilan yang diadopsi dari tahapan Pemilukada menurut KPU Kota Singapraja, merupakan keberhasilan dari perspektif penyelenggara Pemilukada. Wawancara analitik berikutnya menemukan tiga kriteria keberhasilan seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu: dikenal masyarakat, terdaftar sah sebagai calon, dan terakhir menang dalam pemungutan suara (*sing penting terkenal, terdaftar, dan menang!*). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ungkapan "*sing penting terkenal, terdaftar, dan menang*", pada dasarnya juga merupakan konsep. Karena konsep ini digunakan oleh warga masyarakat, maka disebut konsep dari lapangan (*in vivo concept*), atau bisa juga disebut konsep atau pemahaman *emic*.

Sejauh untuk kepentingan sendiri, konsep *in vivo* dan pemahaman *emic* memang sudah bisa digunakan untuk memahami dan menyederhanakan suatu kenyataan yang rumit. Namun demikian, bila dikehendaki agar konsep tersebut diterima oleh masyarakat disiplin ilmu tertentu, harus dilakukan transformasi menjadi konsep *in vitro* dan pemahaman *etic*. Untuk itu, setelah melakukan penelaahan mendalam dan diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki kecakapan dalam kajian ilmu politik, maka ketiga konsep *in vivo* tersebut bisa diwadahi dalam tiga konsep *in vitro*, yaitu: popularitas, legalitas, dan elektabilitas pasangan calon kepala daerah.

Popularitas menunjuk pada seberapa luas seorang bakal atau calon kepala daerah dikenal oleh warga masyarakat yang hendak memberikan suara dalam

pemilihan kepala daerah. Legalitas menunjuk pada keabsahan secara perundang-undangan bagi seseorang untuk mengikuti atau disertakan dalam pemilihan kepala daerah. Elektabilitas menunjuk pada tingkat peluang bagi seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk dipilih oleh warga yang memiliki hak pilih.

Akhirnya, seperti disajikan pada paparan hasil penelitian ini, ketiga konsep keberhasilan calon kepala daerah secara berurutan dan bertahap tersebut bisa direlasikan dengan berbagai strategi atau tindakan yang dilakukan. Artinya, ada sejumlah strategi ranah tujuannya adalah meningkatkan popularitas, ada strategi yang ranah tujuannya adalah mendapatka legalitas, dan ada strategi yang ranah tujuannya adalah meningkatkan elektabilitis pasangan calon walikota dan wakil walikota Singapraja. Proses menghubungkan antara konsep secara logis, baik *in vivo* maupun *in vitro*, yang dalam penelitian ini penulis sebut proses teorisasi. Karena konsep-konsep yang dihubungkan berasal dari lapangan, teori yang dihasilkan disebut teori berdasar data lapangan (*grounded theory*). Dari segi proses penyusunannya, teori berdasar data lapangan dibedakan dari teori agung (*grand theory*), karena teori agung justru bertolak dunia konsep menuju dunia kongkrit, sedangkan teori berdasar data lapangan bertolak dari dunia kongkrit menuju dunia konsep.

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Glasser dan Strauss (1975: 32), penelitian untuk pengembangan teori berdasar data lapangan dapat menghasilkan dua jenis teori, yaitu: teori substantif dan teori formal. Teori substantif lebih bersangkutan-paut dengan gejala empiris penelitian sosiologi, sedangkan teori formal lebih berisi konsep-konsep abstrak kajian sosiologi.

Penelitian ini, sebagaimana disajikan dalam bagian-bagian selanjutnya, menghasilkan dua jenis teori, yaitu: (1) teori substantif tentang jejaring dan praktik politik nepotisme daerah, dan (2) teori formal tentang jejaring dan praktik politik patronase daerah.

G. Metode Interpretasi Hasil dan Rekonstruksi Teori

Berdasarkan hasil analisis, baik selama kegiatan lapangan maupun pasca kegiatan lapangan, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi realis agar sejalan dengan prinsip pemaparan rinci. Namun demikian, suatu narasi realis tidak bisa berbicara sendiri atau memunculkan makna sendiri, sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut (Jupp, 2006: 186).

Dalam penelitian ini, kegiatan interpretasi dan elaborasi data dimaksudkan untuk memberikan makna penting dan padu atas data penelitian (*significance or coherent meaning*). Sebagaimana dikemukakan Neuman (2000: 148), seorang peneliti kualitatif menafsirkan data dengan memberikannya makna, menterjemahkannya, atau membuatnya dapat dipahami. Namun demikian, makna yang diberikan peneliti senantiasa bertolak dari sudut pandang orang-orang yang diteliti. Peneliti menafsirkan data dengan menemukan bagaimana para subjek penelitian melihat dunia, mendefinisikan situasi, atau dengan kata lain sangat mempertimbangkan pandangan subjek penelitian.

Penafsiran tingkat pertama (*first-order interpretation*) yang bersifat emik direkonstruksi berdasarkan pandangan etik dari peneliti dan khasanah teori yang ada. Melalui cara ini bisa ditemukan atau dikembangkan pemahaman tingkat

kedua (*second-order interpretation*). Bila penelitian hanya dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan interpretif, langkah analisis bisa cukup sampai langkah interpretasi dan elaborasi. Namun demikian, sejalan dengan maksud penelitian ini untuk menghasilkan teori substantif sekaligus teori formal sehingga mencapai penafsiran tingkat ketiga (*third-order interpretation*), maka diperlukan satu langkah lagi untuk menghasilkan atau mengaitkan antara interpretasi tingkat kedua dengan teori yang lebih umum (Neuman, 2000: 148).

Langkah rekonstruksi teori dari lapangan menuntut baik kemampuan analitik-logik, kepekaan teoritis maupun imajinasi teoritis (*theoretical sensitiveness and imagination*). Ini sejalan dengan anjuran Bogdan dan Taylor (1975: 126), peneliti kualitatif harus mendidik dirinya sendiri dengan senantiasa menciptakan pendekatan dan metode baru.

Secara ringkas, Glaser dan Strauss (1975: 80) menunjukkan ada tiga strategi untuk mengembangkan teori formal. Masing-masing adalah: (1) membangun teori formal dari satu area penelitian (*one-area formal theory*), (2) membangun teori formal dari banyak area penelitian (*multi-area formal theory*), dan (3) membangun teori formal dari perumusan secara langsung (*direct formulation of formal theory*).

Karena didasarkan pada satu area penelitian, yaitu praktik politik nepotisme dalam Pemilihan kepala daerah di Kota Singaperbangsa Karawang, maka strategi yang harus dipilih dalam penelitian ini adalah pengembangan teori formal berdasarkan satu area penelitian. Berkenaan dengan strategi ini, Glaser dan Strauss (1975: 80) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan suatu teori

substantif menjadi teori formal yang didasarkan pada satu area kajian, bisa digunakan dua teknik penulisan ulang. Pertama, secara sederhana, peneliti dapat menghilangkan sifat-sifat, kata-kata, maupun ungkapan-ungkapan substantif. Kedua, peneliti bisa pula menulis ulang suatu teori substantif hingga derajat puncaknya. Dengan menerapkan teknik penulisan ulang terhadap teori substantif, peneliti dapat mengubah fokus perhatian dari persoalan substantif ke persoalan formal.

Secara teknik, ada empat langkah utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, menyempurnakan teori substantif yang diajukan berdasarkan data lapangan. Sebagai contoh, bila data lapangan menunjukkan bahwa suatu kategori terlalu umum dan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, maka berdasarkan data lapangan pula, kategorisasi diperhalus dengan melakukan pemilahan lebih rinci.

Kedua, menghilangkan muatan substantif (*substantive content*) dalam teori yang diajukan, sehingga perhatian dan pemikiran terfokus pada sejumlah konstruk formal (*formal constructs*). Karena semua persoalan teoritis penelitian ini dikaji dalam konteks substantif praktik politik nepotisme dalam Pemilihan kepala daerah di Kota Singapraja, maka secara sederhana langkah yang ditempuh adalah menghilangkan muatan substantif Pemilihan kepala daerah di Kota Singapraja. Dengan demikian, konsep-konsep dan proposisi yang ditelaah pun tinggal konstruk formal yang berkembang dalam kajian praktik politik nepotisme .

Ketiga, mengintegrasikan sejumlah konstruk formal ke dalam pemikiran teoritis yang lebih umum. Langkah ini hanya bisa dilakukan setelah peneliti

mengkaji secara cermat pokok-pokok pikiran dan imajinasi teoritis yang berkembang dalam kajian budaya politik.

Keempat, mengembangkan teori secara proposisional dan diagramatik, dengan memperhatikan dua prinsip utama. Pertama, prinsip kesederhanaan (*parsimony*) yang berarti bahwa semakin sederhana semakin baik. Suatu teori disebut parsimonius apabila memiliki kerumitan minimum, dan tidak ada yang tumpang tindih atau berlebihan (Neuman, 2000: 40). Kedua, prinsip kemiripan (*isomorphism*). Selain harus sederhana, suatu model teoritis juga harus memenuhi kriteria dasar yang berlaku dalam metodologi pemodelan (Gordon, 1991: 107).

Dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982: 35) bahwa penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses ketimbang hasil semata, serta lebih sesuai untuk mengkaji suatu proses daripada hubungan antar variabel, maka model yang dipandang cocok untuk menggambarkan fenomena praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah adalah model jejaring (*network model*). Secara sederhana, model jejaring menggambarkan para aktor yang terlibat, sifat dasar hubungan, arah hubungan, dan besar kecilnya pengaruh antar aktor, baik individu maupun kolektiva.